



Pemerintahan Modern di Tengah Krisis Kepercayaan Publik dan Tantangan Transparansi

Modern Governance Amidst a Crisis of Public Trust and the Challenge of Transparency

Dheajeng Evita Azzahra¹, Mefara Aneira Adristi Purnomo², Meirinawati³,
Indra Devian Lumban Gaol⁴

Fakultas Kampus 5 Magetan, Universitas Negeri Surabaya

Email : 25112064030@mhs.unesa.ac.id¹*, 25112064015@mhs.unesa.ac.id², meirinawati@unesa.ac.id³,
Indragaol@unesa.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received : 15-04-2026

Revised : 17-04-2026

Accepted : 19-04-2026

Published : 21-04-2026

Abstract

The crisis of public trust in government is one of the main challenges in modern governance. This low level of trust is generally triggered by bureaucratic practices that lack transparency, weak accountability, and minimal public participation in the policy-making process. This article aims to analyze how modern governments are responding to this crisis, particularly through efforts to increase transparency and openness of public information. The method used is a qualitative approach with a literature review of various relevant sources. The study results indicate that the application of good governance principles, the use of digital technology, and the strengthening of public oversight mechanisms are important steps in rebuilding public trust. However, the implementation of transparency policies still faces various obstacles, such as a bureaucratic culture that is not yet fully open and limited institutional capacity. Therefore, a strong commitment from the government and active public support are needed to create more open, responsive, and trustworthy governance.

Keywords: *modern government, public trust, transparency*

Abstrak

Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Rendahnya tingkat kepercayaan ini umumnya dipicu oleh praktik birokrasi yang kurang transparan, lemahnya akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintahan modern merespons krisis tersebut, khususnya melalui upaya peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai sumber relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan mekanisme pengawasan publik menjadi langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan transparansi masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka dan keterbatasan kapasitas institusi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah serta dukungan aktif masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan terpercaya.

Kata Kunci : *pemerintahan modern, kepercayaan publik, transparansi*

PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintahan modern membawa perubahan yang cukup mendasar dalam cara negara menjalankan fungsi pelayanan dan pengelolaan kebijakan publik. Pemerintah tidak lagi hanya dipandang sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai penyelenggara layanan yang



harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan adil. Perubahan ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang membuat pola hubungan antara pemerintah dan warga menjadi lebih terbuka. Masyarakat kini tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga mulai aktif mengawasi dan menilai setiap langkah yang diambil oleh pemerintah. Kondisi tersebut menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Di tengah tuntutan tersebut, muncul persoalan yang cukup krusial, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Fenomena ini dapat dilihat dari meningkatnya kritik, protes, hingga sikap apatis sebagian masyarakat terhadap kebijakan publik. Beberapa faktor yang memicu kondisi ini antara lain adanya praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, komunikasi pemerintah yang kurang terbuka juga sering menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi di tengah masyarakat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dapat berdampak pada melemahnya legitimasi pemerintah serta menurunnya efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis kepercayaan tersebut adalah dengan memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi tidak hanya berarti membuka akses informasi kepada publik, tetapi juga mencakup kejelasan proses pengambilan keputusan, keterbukaan anggaran, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kebijakan dibuat dan bagaimana sumber daya publik dikelola. Hal ini secara tidak langsung dapat mendorong terciptanya pengawasan publik yang lebih kuat serta meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

Namun, penerapan transparansi dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi internal, masih terdapat budaya birokrasi yang cenderung tertutup dan kurang adaptif terhadap perubahan. Tidak semua instansi memiliki kesiapan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung keterbukaan informasi. Sementara itu, dari sisi eksternal, masih ada kesenjangan dalam akses informasi di masyarakat, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun rendahnya literasi digital. Kondisi ini membuat upaya transparansi belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih komprehensif agar transparansi tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemerintahan modern di tengah krisis kepercayaan publik dan tantangan transparansi yang dihadapi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Selain itu, tulisan ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai kendala yang ada serta merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan terpercaya. Dengan demikian, diharapkan pemerintah mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat secara bertahap melalui praktik pemerintahan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih menekankan pada pemahaman terhadap fenomena



krisis kepercayaan publik dan transparansi dalam pemerintahan, bukan pada angka atau perhitungan statistik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tergambar kondisi yang terjadi serta keterkaitannya dengan konsep pemerintahan modern yang berkembang saat ini.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, digunakan pula sumber dari kebijakan dan peraturan yang relevan untuk melihat bagaimana transparansi diterapkan dalam praktik pemerintahan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan pembahasan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah informasi penting dari berbagai literatur yang telah dipilih. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan pokok bahasan, seperti konsep pemerintahan modern, penyebab menurunnya kepercayaan publik, serta upaya peningkatan transparansi. Pengelompokan ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara menguraikan dan menghubungkan berbagai informasi yang telah dikumpulkan. Berbagai pendapat ahli serta hasil penelitian sebelumnya dibandingkan untuk melihat kesesuaian maupun perbedaannya. Dari proses ini, kemudian ditarik kesimpulan mengenai peran transparansi dalam mengatasi krisis kepercayaan publik serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan perbandingan dari beberapa sumber yang berbeda agar informasi yang digunakan tidak bersifat sepihak. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh hasil analisis kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Modern dan Tuntutan Transparasi

Pemerintahan modern tidak lagi bisa dijalankan dengan pola lama yang cenderung tertutup dan berjarak dengan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya kesadaran masyarakat membuat pemerintah dituntut untuk lebih terbuka dalam menjalankan tugasnya. Keterbukaan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sudah menjadi kebutuhan agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai membuka informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disampaikan secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Banyak pemerintah daerah maupun pusat mulai memanfaatkan teknologi digital, seperti website resmi, media sosial, hingga layanan berbasis aplikasi untuk menyampaikan informasi kepada publik. Langkah ini menunjukkan adanya perubahan menuju pemerintahan yang lebih terbuka. Namun, dalam praktiknya, keterbukaan tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, transparansi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas. Ketika pemerintah membuka informasi kepada publik, maka secara tidak langsung pemerintah juga siap untuk dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mendorong kinerja yang lebih baik serta



meminimalisir potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, transparansi bukan hanya tuntutan, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Krisis Kepercayaan Publik dalam Pemerintahan

Di tengah upaya menuju pemerintahan yang lebih terbuka, muncul persoalan yang cukup serius, yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kondisi ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kritik yang disampaikan masyarakat, baik melalui media sosial maupun dalam bentuk aksi langsung. Masyarakat tidak lagi mudah percaya terhadap kebijakan yang diambil, terutama jika tidak disertai dengan penjelasan yang jelas dan terbuka.

Beberapa faktor yang menyebabkan krisis kepercayaan ini antara lain adanya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat juga memperburuk kondisi tersebut. Informasi yang tidak disampaikan secara utuh sering menimbulkan kesalahpahaman, bahkan memicu munculnya isu yang tidak benar. Dalam situasi seperti ini, persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah menjadi semakin kuat.

Dampak dari krisis kepercayaan ini cukup besar. Masyarakat menjadi cenderung apatis dan kurang berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Bahkan, tidak sedikit kebijakan yang mendapat penolakan karena masyarakat sudah terlanjur tidak percaya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan mengganggu stabilitas pemerintahan serta menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Peran Transparansi dalam Membangun Kepercayaan Publik

Transparansi dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengatasi krisis kepercayaan publik. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengambilan kebijakan dilakukan, termasuk dasar pertimbangan yang digunakan. Hal ini penting untuk mengurangi kecurigaan serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diambil.

Selain itu, transparansi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi, maka mereka dapat menilai apakah kebijakan yang diambil sudah sesuai atau belum. Pengawasan dari masyarakat ini menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat mendorong pemerintah untuk bekerja lebih baik dan lebih hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan.

Transparansi juga berperan dalam memperkuat akuntabilitas. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat diketahui oleh publik, sehingga pemerintah tidak bisa bertindak sembarangan. Dalam jangka panjang, keterbukaan seperti ini akan membangun kepercayaan secara perlahan. Masyarakat akan melihat bahwa pemerintah bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan yang sempat menurun dapat kembali meningkat.

Tantangan dalam Implementasi Transparansi

Meskipun transparansi memiliki peran yang penting, penerapannya tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu kendala yang sering muncul adalah masih adanya budaya birokrasi yang



tertutup. Sebagian aparaturnya pemerintah masih menganggap informasi sebagai sesuatu yang harus dibatasi, bukan dibuka. Pola pikir seperti ini menjadi hambatan dalam mewujudkan keterbukaan yang sebenarnya dalam pemerintahan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua instansi memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Penggunaan teknologi memang sudah mulai diterapkan, tetapi belum merata di semua daerah. Ada daerah yang sudah cukup maju dalam hal digitalisasi, namun ada juga yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi infrastruktur maupun kemampuan sumber daya manusia.

Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi kendala dalam mengakses informasi. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang disampaikan, terutama jika menggunakan istilah yang terlalu teknis atau sulit dipahami. Rendahnya literasi digital juga membuat sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan informasi yang tersedia secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesiapan dari masyarakat.

Upaya Penguatan Transparansi dalam Pemerintahan Modern

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Sistem berbasis digital dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta mempercepat penyampaian data dari pemerintah. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting. Aparaturnya pemerintah perlu diberikan pelatihan dan pemahaman mengenai pentingnya transparansi serta cara menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja dalam pemerintahan.

Di samping itu, partisipasi masyarakat juga perlu didorong. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga harus aktif dalam memberikan masukan dan melakukan pengawasan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, transparansi dapat berjalan lebih efektif dan tidak bersifat satu arah. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik serta mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan modern menghadapi tantangan besar berupa krisis kepercayaan publik yang dipicu oleh rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Perubahan paradigma pemerintahan yang semakin terbuka menuntut adanya perbaikan dalam tata kelola, di mana pemerintah tidak lagi hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik yang responsif dan dapat dipercaya oleh masyarakat.



Transparansi menjadi salah satu kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan publik. Keterbukaan informasi, kejelasan proses pengambilan kebijakan, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan legitimasi pemerintah. Selain itu, transparansi juga mendorong terciptanya akuntabilitas, karena setiap tindakan pemerintah dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Namun demikian, implementasi transparansi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, budaya birokrasi yang cenderung tertutup serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan utama. Sementara itu, dari sisi eksternal, rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses informasi di sebagian masyarakat juga menghambat efektivitas transparansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan membutuhkan kesiapan dari semua pihak.

Oleh karena itu, diperlukan langkah yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat transparansi dalam pemerintahan. Pemerintah perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, memperkuat kapasitas aparatur, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan publik, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Afiyanti, Y. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 145–156.
- Pratama, A. B., & Kurniawan, T. (2023). Digital governance dan keterbukaan informasi publik dalam era pemerintahan modern. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 1–12.
- Sari, N. M., & Hidayat, R. (2021). Pengaruh good governance terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 210–220.
- Wibowo, A., & Nugroho, R. (2024). Peran transparansi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas kebijakan publik. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(1), 55–67.
- Yuliana, D., & Putra, F. (2022). Tantangan implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 89–102.